

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem pemerintahan di Indonesia yang telah mengalami perubahan dari sistem terpusat jadi otonomi daerah, memberi pengaruh yang besar pada keterseleenggaraan pemerintahan serta ruang lingkup kerja secara umum, sehingga berpengaruh juga pada perubahan pengaturan sistem pemerintah daerah (Vitriana et al., 2022). Pemerintah Daerah diharapkan dapat menyediakan data Pemerintahan Daerah yang meliputi Pembangunan serta Keuangan Daerah. Dalam rangka melakukan pertanggungjawaban proses perencanaan serta anggaran, penggunaan teknologi adalah kewajiban yang harus diterapkan oleh pemerintah daerah (Balqis & Fadhly, 2021) serta melakukan peningkatan pada program pembangunan untuk seluruh bidang sebagai alat untuk memberikan informasi dengan sempurna serta memberikan keterlibatan pada seluruh orang secara luas dengan pemanfaatan teknologi digital agar jadi harapan dalam pengelolaan pemerintahan daerah pada masa kini sekaligus masa depan (Nasution & Nurwani, 2021)

Dalam rangka mewujudkan informasi valid, akurat, dan efisiensi serta terselenggaranya pemerintahan yang baik dalam perencanaan serta penganggaran, penggunaan sistem informasi merupakan sebuah kewajiban yang harus diterapkan oleh pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan peraturan baru yang dikeluarkan yang memberikan aturan mengenai Sistem Informasi Pemerintah Daerah yaitu Permendagri No. 70 Tahun 2019 yang sebelumnya menggantikan Permendagri No

98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah. Pergantian Permendagri ini dilakukan karena Permendagri No 98 Tahun 2018 belum mengatur informasi pemerintahan daerah dalam satu sistem yang terhubung dan saling berkaitan.

Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang SIPD menyatakan bahwa pemerintahan daerah wajib menyediakan informasi pemerintahan daerah berupa informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah dan informasi pemerintahan daerah lainnya yang dikelola dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah yang saling terhubung dan terintegrasi dengan berbasis elektronik serta dapat diakses melalui situs jaringan resmi Kementerian Dalam Negeri.

Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) merupakan aplikasi terpadu yang digunakan untuk alat membantu pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas implementasi dari beragam regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah (Nasution & Nurwani, 2021) dengan asas efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel, dan auditabel (Wicaksono & Mispriyanti, 2019). SIPD adalah sistem informasi yang berisikan perencanaan pembangunan daerah, keuangan daerah, serta pembinaan dan pengawasan pemerintahan daerah. SIPD punya fungsi untuk jaringan guna mengumpulkan data secara nyata sekaligus cepat dengan mempergunakan teknologi informasi, sebagai dukungan dalam perencanaan program dan kegiatan serta evaluasi pembangunan daerah secara rasional, efektif dan efisien. Selain itu sistem SIPD dipergunakan untuk memberikan dukungan integrasi pemanfaatan data terkait dengan perkembangan pembangunan pada masing-masing instansi pemerintah (Nasution & Nurwani, 2021)

SIPD ialah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan daerah menjadi informasi yang bisa disajikan pada masyarakat sekaligus sebagai bahan yang dipergunakan untuk pengambilan keputusan untuk perencanaan, pelaksanaan, evaluasi kinerja pemerintah daerah dengan tujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan data serta informasi pembangunan daerah (Vitriana et al., 2022). Sistem informasi ini berjalan secara online, efisien dan mandiri tetapi tetap terawasi dari pusat yang akan memudahkan siapa saja, kapan saja dan dimana saja untuk mengakses data informasi yang diinginkan dimana faktor kelengkapan, kemutakhiran, keakuratan dan validitas data menjadi unsur yang penting dalam proses pengumpulan dan penginputan elemen data melalui sebuah sistem data dan informasi (Deseverians & Wulandari, 2020)

Penggunaan SIPD berpedoman pada Permendagri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang otomatis menggantikan Permendagri sebelumnya yaitu Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah maka keseluruhan bentuk kegiatan pengelolaan keuangan daerah yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah dengan melibatkan informasi, aliran data, penggunaan dan penyajian dokumen dilakukan secara elektronik dan saling terhubung dan terintegrasi.

Program aplikasi SIPD ini bertujuan untuk memberikan fasilitas dan mendorong terwujudnya sistem data dan informasi pembangunan, informasi

keuangan serta informasi pemerintahan lainnya bagi pengambilan keputusan baik di daerah maupun di pusat. Sistem ini juga diharapkan dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah melalui kerjasama berbasis teknologi sehingga dapat membangun database yang ada di daerah serta dapat menggambarkan potensi dan sumberdaya yang dimiliki oleh daerah dalam mendukung pengembangan sistem informasi pengelolaan daerah yang valid dan akurat (Nasution & Nurwani, 2021).

Berdasarkan observasi awal penulis menemukan beberapa masalah yaitu sejak Kementerian Dalam Negeri mewajibkan Pemerintah Daerah menggunakan aplikasi terbaru SIPD pada tahun 2020. Setiap pemerintahan daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki permasalahan yang berbeda-beda. Sebagian Pemerintah Kabupaten/Kota mengalami kendala dalam koneksi internet, sebagian lain permasalahan pada minimnya pemahaman operator. SIPD merupakan sistem pengelolaan keuangan yang mudah dipahami dan dioperasikan, mampu meningkatkan efektifitas dan efisiensi agar tujuan dari pemanfaat sistem itu sendiri terlaksana namun dalam tahap awal penerapan SIPD ini banyak terjadi kendala dan masalah yang dialami seperti banyak pengguna dan operator yang masih kurang paham dalam menggunakan aplikasi SIPD, dikarenakan banyaknya menu yang harus diisi dalam penginputan data di SIPD.

Selanjutnya pengguna SIPD pada umumnya tidak diajarkan secara langsung bagaimana penggunaan dari program aplikasi tersebut. Selain itu sistem yang sering eror memperlambat pekerjaan para pengguna SIPD tersebut, dan jika disuruh memilih beberapa operator aplikasi SIPD lebih memilih menggunakan aplikasi yang lama yakni SIPKD. Selain itu banyaknya menu yang harus diisi dalam penginputan di program aplikasi SIPD seringkali para pengguna

melewatkan salah satu proses penginputan sehingga laporan yang dihasilkan berbeda.

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat awalnya memanfaatkan program aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) untuk melaksanakan pengelolaan keuangan daerah secara transparan serta akuntabel, namun dengan penetapan Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tersebut, akhirnya juga menerapkan SIPD. Penerapan SIPD dimulai Tahun 2020 pada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Sumatera Barat, termasuk didalamnya Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang anggotanya merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terdiri dari BAPPEDA, BPKAD dan INSPEKTORAT. Penerapan SIPD dimulai secara bertahap yaitu berupa proses perencanaan dan penganggaran, namun belum sampai tahapan penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban.

Pemanfaatan aplikasi SIPD berbeda-beda di setiap Pemerintah Daerah, maka penelitian ini fokus pada OPD TAPD Pemerintah Provinsi Sumatera Barat saja. Hal ini dikarenakan banyak permasalahan yang ditemui dalam penerapan aplikasi SIPD pada OPD TAPD Provinsi Sumatera Barat berupa jaringan SIPD yang sering error baik akses aplikasi dari Kemendagri langsung maupun koneksi internet serta mengalami error ketika banyak yang mengakses aplikasi ini khususnya pada jam kerja sehingga menghambat dalam proses perencanaan dan penganggaran. Keberhasilan suatu penerapan SIPD pada OPD TAPD Provinsi Sumatera Barat tidak terlepas dari dukungan pengguna sistem dan bagaimana mereka memanfaatkan sistem informasi yang telah disediakan. Oleh karena itu

penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis penerapan SIPD secara mendalam serta mengeksplorasi secara kualitatif apa yang terjadi sesungguhnya terkait penerapan SIPD pada OPD TAPD Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

Permasalahan yang terjadi pada OPD TAPD Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tersebut, didukung oleh beberapa temuan hasil penelitian terdahulu. Nasution & Nurwani (2021) menyatakan dalam penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) oleh beberapa OPD khususnya di BPKAD Kota Medan ditemukan bahwa dengan banyak menu pada SIPD yang harus diisi pada saat penginputan, hal ini membuat sering kali pegawai terlewatkan salah satu proses inputnya hingga menyebabkan menghasilkan laporan berbeda, sehingga menjadikan pergeseran anggaran yang tertunda, sekaligus juga menjadikan sistem penggajian yang terhambat. Selain itu juga terjadi jaringan SIPD yang sering mengalami error sehingga memberikan hambatan untuk penyusunan anggaran kas, pembuatan SPD (Surat Penyediaan Dana), pembuatan SPJ (Surat Pertanggung jawaban), Pembuatan SPP (Surat Perintah Pembayaran), pembuatan SPM (Surat Perintah Membayar), serta pembuatan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana).

Riani et al., (2021) menyatakan untuk kesiapan penerapan SIPD pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gianyar diperlukan persiapan yang matang dari pihak pemakai yang dalam hal ini merupakan pegawai untuk mengurangi kegagalan dalam penerapan SIPD. Vitriana et al., (2022) menyatakan penerapan SIPD di BPKAD Pekanbaru baru sampai pada tahapan perencanaan dan penganggaran belum sampai tahap penatausahaan dan pelaporan hingga pertanggungjawaban. Hal ini dikarenakan pegawai banyak yang masih kurang paham untuk penggunaan aplikasi, akibat banyak menu yang harus dilakukan

pengisian untuk penginputan data di SIPD, pegawai juga sering terlewat akan salah satu proses input hingga menyebabkan laporan yang dihasilkan berbeda, pergeseran anggaran yang tertunda, dan sistem penggajian yang terhambat. Selain itu SIPD juga terkadang mengalami error ketika banyak yang melakukan akses aplikasi, terkhusus pada saat jam kerja sehingga memberikan hambatan dalam proses penyusunan anggaran kas, dan pembuatan surat-surat penting.

Berdasarkan temuan penelitian-penelitian Nasution & Nurwani (2021); Riani et al., (2021) dan Vitriana et al., (2022) sebelumnya dapat diketahui bahwa dalam penerapan SIPD masih belum optimal, beberapa Pemerintah Daerah masih mengalami kendala dalam penerapan aplikasi ini mulai dari sistem itu sendiri, sumberdaya, komunikasi, dan faktor lainnya. Mulyani & Kurniadi (2015) menyatakan pemanfaatan teknologi informasi dapat dilakukan secara efektif salah satunya jika anggota dalam organisasi memiliki kemampuan dan keahlian dalam penerapan untuk menggunakan teknologi tersebut dengan baik.

Pengevaluasian penerapan SIPD dilakukan bukan hanya karena sistem yang masih baru namun kesiapan pengguna terhadap sistem juga sangat penting. Kesiapan terhadap teknologi informasi juga mempengaruhi kemampuan individu untuk bisa beradaptasi dengan teknologi yang semakin lama semakin berkembang. Selain itu penerimaan pengguna juga tidak kalah penting penerapannya. Dalam sistem informasi penerimaan pengguna merupakan salah satu unsur penting dalam penerapan sebuah sistem informasi. Kesuksesan sebuah sistem informasi tidak hanya ditentukan oleh bagaimana sistem dapat memproses masukan dan menghasilkan informasi dengan baik, tetapi juga bagaimana pengguna mau menerima dan menggunakannya, sehingga mampu mencapai tujuan organisasi (Hasanah et al., 2020).

Untuk menilai apakah terdapat keberhasilan penerapan SIPD dalam menghasilkan pelaporan keuangan yang bermanfaat diperlukan suatu tinjauan teoritis. Dalam hal ini, Model DeLone & McLean dapat digunakan untuk mengukur kesuksesan sistem informasi yang dikenal dengan DeLone & McLean *Information Success Model*. Secara umum model kesuksesan Delone & Mclean merupakan kerangka yang dapat dijadikan untuk memberikan evaluasi atas implementasi penggunaan sistem informasi (Hudin & Riana, 2016)

Model kesuksesan sistem informasi diperkenalkan oleh DeLone & McLean tahun 1992 (Zahri & Kusumastuti, 2020). Model yang diusulkan oleh DeLone dan McLean tahun 1992 menggunakan enam elemen atau faktor atau komponen sebagai pengukur kesuksesan sistem informasi yaitu kualitas informasi (*information quality*), kualitas sistem (*system quality*), penggunaan sistem (*use*), kepuasan pengguna (*user satisfaction*), dampak individual (*individual impact*), dan dampak organisasi (*organizational impact*). Kesuksesan implementasi sebuah sistem informasi dapat dilihat dari karakteristik kualitatif dari kualitas sistem, kualitas output berupa informasi yang dihasilkan, konsumsi terhadap output yang dilihat dari penggunaan, respon pengguna terhadap sistem informasi yang dilihat dari kepuasan pemakai, pengaruh sistem informasi terhadap kebiasaan pengguna dilihat dari dampak individu, dan kemudian pengaruhnya terhadap kinerja organisasi atau dampak organisasi (Krisdiantoro et al., 2018).

Dari masukan-masukan yang didapatkan serta banyaknya perkembangan yang terjadi pada sistem teknologi informasi sekaligus terjadinya perubahan pada lingkungan penggunaan membuat DeLone dan McLean tahun 2003 melakukan pembaruan modelnya dengan cara memperluasnya. Delone dan McLean

melakukan penambahan variabel kualitas pelayanan (*service quality*), sekaligus melakukan penggantian pada variabel dampak individual dan dampak organisasi jadi manfaat bersih (*net benefits*), serta melakukan penambahan variabel minat memakai (*intention to use*) sebagai alternatif dari variabel penggunaan (*use*) (Krisdiantoro et al., 2018).

Model DeLone & McLean adalah model yang paling sering digunakan oleh sebagian besar peneliti untuk mengidentifikasi kesuksesan sistem informasi. Beberapa penelitian telah menguji kesuksesan sistem informasi menggunakan model Delone & McLean diberbagai jenis sistem informasi, seperti Sistem Informasi Manajemen Pengadaan Langsung (Krisdiantoro et al., 2018), portal Flexible Learning (FLearn) yang digunakan sebagai salah satu media untuk pembelajaran akuntansi oleh Program Studi (Prodi) Akuntansi (Hermawan & Hapsari, 2021), Sistem Informasi Akuntansi Zahir Accounting (Zuama et al., 2017), Sistem Informasi Akuntansi (Mutiha et al., 2016; Ramadhan, 2015), Sistem Akuntansi Instansi Basis Akrual (SAIBA) (Noviyanti, 2016), sistem Informasi Akuntansi Keuangan pemerintah Daerah (SIMKADA) (Kholis et al., 2020), Sistem Modernisasi Perpajakan E-Billing (Al Farizi, 2018), Sistem Informasi Akuntansi padaa UKM (Nurhaida & Putra, 2019). Selain itu Model Delone & McLean telah banyak digunakan untuk menguji kesuksesan sistem informasi pada beragam instansi seperti pada pemerintahan (Kholis et al., 2020; Noviyanti, 2016; Krisdiantoro et al., 2018) dan Perguruan Tinggi (Zuama et al., 2017; Mutiha et al., 2016; Ramadhan, 2015; Hermawan & Hapsari, 2021), UKM (Nurhaida & Putra, 2019).

Oleh sebab itu, model DeLone & McLean adalah model yang paling tepat untuk digunakan dalam mengevaluasi kesuksesan SIPD yang telah diterapkan pemerintah Provinsi Sumatera Barat karena model ini telah pernah dipergunakan sebelumnya untuk menguji kesuksesan sistem informasi pada instansi pemerintahan. Penelitian yang akan dilaksanakan mempergunakan Model Kesuksesan Sistem Informasi DeLone dan McLean tahun 1992 serta model DeLone dan McLean yang telah dilakukan pembaharuan tahun 2003, namun hanya akan membahas pengaruh kualitas sistem dan kualitas informasi terhadap manfaat bersih dengan intensitas penggunaan sebagai variabel mediasi.

Alasan tidak mempergunakan kualitas pelayanan (*service quality*) dikarenakan untuk penggunaan SIPD pada OPD TAPD Provinsi Sumatera Barat tidak memberikan penilaian pada kualitas pelayanan (*service quality*) karena instansi ini bukanlah pemberi jasa pelayanan. Kemudian juga tidak membahas minat memakai (*intention to use*) dikarenakan instansi tersebut memang diharuskan memakai penggunaan SIPD sehingga tidak relevan untuk minat memakai, sementara untuk kepuasan pengguna (*user satisfaction*) juga tidak dibahas dikarenakan penggunanya bukanlah pengguna akhir dari pengguna SIPD sehingga tidak dapat dibahas kepuasan penggunanya karena pengguna memang dituntut untuk mampu mempergunakan aplikasi SIPD. Penelitian ini akan menguji kesuksesan penerapan SIPD pada OPD TAPD Provinsi Sumatera Barat. Adapun evaluasi kesuksesan sejak diterapkannya SIPD di OPD TAPD Provinsi Sumatera Barat ini penting dalam meningkatkan kinerja individu dan juga memudahkan pengelolaan keuangan bagi OPD TAPD Provinsi Sumatera Barat.

1.2 Rumusan Masalah

Sepengetahuan peneliti dengan masih banyak permasalahan teknis dan kesiapan operator SIPD dalam menggunakan sistem. Maka untuk menjawab pertanyaan ini dibutuhkan investigasi empiris lebih lanjut. Dengan demikian, maka dapat dibuat pertanyaan penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah kualitas sistem berpengaruh terhadap intensitas penggunaan sistem?
2. Apakah kualitas informasi berpengaruh terhadap intensitas penggunaan sistem?
3. Apakah kualitas sistem berpengaruh terhadap manfaat bersih penggunaan sistem?
4. Apakah kualitas informasi berpengaruh terhadap manfaat bersih penggunaan sistem?
5. Apakah intensitas penggunaan berpengaruh terhadap manfaat bersih penggunaan sistem?
6. Apakah kualitas sistem berpengaruh terhadap manfaat bersih penggunaan sistem dengan intensitas penggunaan sebagai variabel mediasi?
7. Apakah kualitas informasi berpengaruh terhadap manfaat bersih penggunaan sistem dengan intensitas penggunaan sebagai variabel mediasi?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk menjawab pertanyaan penelitian, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji pengaruh kualitas sistem terhadap intensitas penggunaan sistem.
2. Untuk menguji pengaruh kualitas informasi terhadap intensitas penggunaan sistem.
3. Untuk menguji pengaruh kualitas sistem terhadap manfaat bersih penggunaan sistem.
4. Untuk menguji pengaruh kualitas informasi terhadap manfaat bersih penggunaan sistem.
5. Untuk menguji pengaruh intensitas penggunaan terhadap manfaat bersih penggunaan sistem.
6. Untuk menguji pengaruh kualitas sistem terhadap manfaat bersih penggunaan sistem dengan intensitas penggunaan sebagai variabel mediasi.
7. Untuk menguji pengaruh kualitas informasi terhadap manfaat bersih penggunaan sistem dengan intensitas penggunaan sebagai variabel mediasi.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat bagi akademis, hasil penelitian ini dapat meningkatkan pengetahuan, pemahaman, serta literatur tentang pengaruh kualitas sistem dan kualitas informasi terhadap manfaat bersih dengan intensitas penggunaan sebagai variabel mediasi. Penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya.
2. Dari hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat berguna dan memiliki manfaat antara lain sebagai berikut :

a. Bagi penulis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah dan mengembangkan pengetahuan dan wawasan mengenai hal-hal yang mempengaruhi manfaat bersih dari penggunaan SIPD serta dapat mengaplikasikan ilmu yang telah didapat dalam menyusun penelitian untuk mencapai hasil yang diharapkan.

b. Bagi TAPD Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

Diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi, pertimbangan dan evaluasi bahwa pentingnya penggunaan SIPD untuk meningkatkan atau memaksimalkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

c. Bagi Pembaca

Diharapkan hasil penelitian ini dapat berguna untuk menambah sumber pustaka di bidang ilmu pengetahuan dan dapat dijadikan bahan referensi dan representatif khususnya yang berhubungan dengan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah bagi peneliti selanjutnya.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari lima bab, di mana antara bab satu dengan yang lainnya saling berhubungan.

Bab I pendahuluan menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. Bab II landasan teori menguraikan kajian teori berupa teori model kesuksesan sistem informasi DeLone & McLean, sistem informasi pemerintahan daerah serta penerapan sistem informasi pemerintahan daerah pada OPD tim anggaran pemerintah daerah

(TAPD) Provinsi Sumatera Barat yang digunakan sebagai bahan acuan yang relevan dengan penelitian ini serta telaah penelitian terdahulu dan pengembangan hipotesis serta juga memaparkan kerangka konseptual.

Bab III metode penelitian menguraikan desain penelitian, metode pengumpulan data, jenis dan sumber data, populasi dan penyampelan, operasionalisasi variabel dan teknik analisis data. Bab IV hasil penelitian dan pembahasan berisi penjelasan mengenai gambaran umum responden, analisis deskriptif variabel, analisis data, pengujian hipotesis serta pembahasan hasil penelitian. Bab V penutup berisikan kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan, implikasi hasil penelitian, keterbatasan penelitian dan saran atas keterbatasan yang diberikan penulis terkait dengan penelitian

